

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Konsep demokrasi sebagai suatu bentuk pemerintahan berasal dari para filsuf Yunani. Akan tetapi, pemakaian konsep ini di zaman modern dimulai sejak terjadinya pergolakan revolusioner dalam masyarakat Barat pada akhir abad ke-18. Pada pertengahan abad ke-20 dalam perdebatan mengenai arti demokrasi muncul tindak pendekatan umum. Sebagai suatu bentuk pemerintahan, demokrasi telah didefinisikan berdasarkan sumber wewenang bagi pemerintah, tujuan yang dilayani oleh pemerintah, dan prosedur untuk membentuk pemerintah.

Indonesia menjadi salah satu negara demokrasi terbesar di dunia. perkembangan demokrasi di Indonesia sejak tahun 1945 hingga saat ini banyak mengalami pasang surut. Hal ini dibuktikan dengan telah dilaksanakannya beberapa bentuk demokrasi di Indonesia yaitu demokrasi pada masa revolusi kemerdekaan (1945-1950), demokrasi parlementer (1950-1959), demokrasi terpimpin (1959-1966), demokrasi orde baru (1966-1998) dan demokrasi masa reformasi (1998-sekarang)

Salah satu ciri dari sebuah negara demokrasi adalah adanya proses pemilihan umum. Dengan adanya pemilihan umum, rakyat dapat menentukan pilihannya tanpa adanya intervensi dari berbagai pihak dan menggunakan hak pilihnya dengan jujur. Pemilu dalam negara demokrasi Indonesia sendiri merupakan suatu proses pergantian kekuasaan secara damai yang

dilakukan secara berkala sesuai dengan prinsip-prinsip yang digariskan konstitusi. Prinsip-prinsip dalam pemilihan umum yang sesuai dengan konstitusi antara lain prinsip kehidupan ketatanegaraan yang berkedaulatan rakyat (demokrasi) ditandai bahwa setiap warga negara berhak ikut aktif dalam setiap proses pengambilan keputusan kenegaraan.

Partisipasi juga merupakan satu aspek penting demokrasi. Asumsi dan yang mendasari demokrasi (dan partisipasi) adalah orang yang paling tahu tentang apa yang baik bagi dirinya adalah orang itu sendiri. Semua keputusan dan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah mempengaruhi kehidupan warga masyarakat, maka semua warga masyarakat mempunyai hak untuk ikut serta dalam menentukan isi keputusan dan kebijakan politik itu sendiri.¹ Oleh karena itu, yang dimaksud dengan partisipasi politik ialah keikutsertaan warga negara biasa dalam menentukan segala keputusan yang menyangkut atau memengaruhi hidupnya termasuk menentukan siapa yang akan menjadi pemimpinnya.

Berdasarkan catatan KPU (Komisi Pemilihan Umum) Pusat, tingkat golput dari tahun ketahun semakin bertambah, kendati di tahun 2014 ada sedikit kenaikan. Data menunjukkan bahwa tingkat golput pada pemilu berturut-turut sejak 1999, 2004, 2009, dan 2014, mencapai 6,70%, 15,93%, 29,01%, dan 24,89% (*kpu.go.id 2015*)².

Sebagai bagian dari Negara Indonesia yang memegang asas demokrasi dalam kegiatan politiknya, KPU Kota Kupang telah

¹A. Rahman, *Sistem Politik Indonesia* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007). Hlm 285.

²*kpu.go.id 2015*

melaksanakan pemilihan kepala daerahnya pada tahun 2017. Berikut ini adalah penyajian data jumlah pemilih berdasarkan jenis kelamin dalam pilkada Kota Kupang tahun 2017.

Tabel 1. Data Pemilih Kota Kupang Berdasarkan Jenis Kelamin Dalam Pilkada Tahun 2017.

No	Pemilih Dalam Pilkada	Jumlah Pemilih				Total	Prosentase
		L	Persentase	P	Persentase		
1	Pemilih tetap	117.737	48,8%	119.539	51,2%	238.711	100 %
2	Pemilih yang menggunakan hak pilih	81.380	69,1%	84.794	70,9%	167.255	70,1 %
3	Pemilih yang tidak menggunakan hak pilih	36.357	30,9%	34.754	29,1%	71.111	29,9 %

(Sumber:Kpu Kota Kupang. 2017)³.

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa dari total 238.711 pemilih hak pilih dalam pilkada Kota Kupang 2017, ada terdapat 167.255 pemilih hak pilih yang menggunakan hak pilihnya dalam pilkada Kota Kupang tahun 2017. Dilihat dari tingkat partisipasi masyarakat Kota Kupang dalam pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kupang tahun 2017, dapat diambil kesimpulan bahwa partisipasi politik masyarakat sudah cukup tinggi. Namun masih ada 29,9% masyarakat Kota Kupang yang bersifat apatis (golput) terhadap proses politik yang berlangsung.

Dilihat dari jumlah pemilih dari tabel di atas banyak masyarakat Kota Kupang yang menggunakan hak pilih mereka pada saat hari pemilihan.

³Kpu Kota Kupang. 2017

Berikut ini adalah data jumlah pemilih dan pengguna hak pilih serta hasil pilkada di setiap kecamatan Kota Kupang.

Tabel 2. Jumlah pemilih dan hasil dari pilkada Kota Kupang tahun 2017 dari setiap kecamatan Kota Kupang.

No	Kecamatan	Pemilih		Suara		Hasil
1	Alak	Pemilih	38.379	Suara Sah	30.159	No 1. 15.599 (51,3%) No 2. 14.809 (48,7%)
		Pengguna Hak Pilih	31.092	Suara Tidak Sah	299	
		Partisipasi	81.0 %	Total Suara	30.458	
2	Kelapa Lima	Pemilih	40.942	Suara Sah	25.600	No 1: 13.424 (52,8%) No 2: 11.980 (47,2%)
		Pengguna Hak Pilih	25.260	Suara Tidak Sah	277	
		Partisipasi	61.7 %	Total Suara	25.677	
3	Kota Lama	Pemilih	20.676	Suara Sah	13.861	No 1: 5.883 (42,4%) No 2: 7.978 (57,6%)
		Pengguna Hak Pilih	14.013	Suara Tidak Sah	149	
		Partisipasi	67.8 %	Total Suara	14.010	
4	Kota Raja	Pemilih	33.403	Suara Sah	23.028	No 1: 12.059 (52,4%) No 2: 10969 (47,6%)
		Pengguna Hak Pilih	23.392	Suara Tidak Sah	272	
		Partisipasi	70.0 %	Total Suara	23.300	
5	Maulafa	Pemilih	50.720	Suara Sah	36.062	No 1: 20.207 (56,1%) No 2: 15.837 (43,9%)
		Pengguna Hak Pilih	36.753	Suara Tidak Sah	373	
		Partisipasi	72.5 %	Total Suara	36.394	
6	Oebobo	Pemilih	54.591	Suara Sah	35.900	No 1: 19.988 (55,3%)

		Pengguna Hak Pilih	36.715	Suara Tidak Sah	344	No 2: 16.157 (44,7%)
		Partisipasi	67.3 %	Total Suara	36.244	

(Sumber:Kpu Kota Kupang. 2017)⁴.

Dari tabel di atas dapat di lihat hasil Pilkada Kota Kupang tahun 2017 dan penggunaan hak suara dari masing-masing kecamatan di Kota Kupang. Namun dari masing-masing kecamatan Kota Kupang masih terdapat masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya, seperti pada Kecamatan Alak ada 7.287(19,0%) hak pilih yang tidak di gunakan, pada Kecamatan Kelapa Lima ada 15.682(38,7%) hak pilih yang tidak di gunakan, pada Kecamatan kota Raja ada 6.663(32,2%) hak pilih yang tidak di gunakan, pada Kecamatan Kota Lama ada 10.011(30,0%)_ hak pilih yang tidak di gunakan, pada Kecamatan Maulafa ada 13.967(27,5%) hak pilih yang tidak di gunakan, sedangkan pada Kecamatan Oebobo ada 36.715(32,7%) hak pilih yang tidak di gunakan.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk menyusun proposal penelitian dengan judul **“TINGKAT PARTISIPASI MASYARAKAT KOTA KUPANG DALAM MEMILIH PADA PILKADA KOTA KUPANG TAHUN TAHUN 2017”**

⁴Kpu Kota Kupang. 2017

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka yang menjadi rumusan masalah adalah :

1. Bagaimana tingkat partisipasi masyarakat Kota Kupang dalam mengikuti Pilkada tahun 2017?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat Kota kupang dalam mengikuti Pilkada tahun 2017?

1.3 Tujuan Penelitian

Mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi tingkat partisipasi politik masyarakat Kota Kupang dalam Pilkada tahun 2017

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis.

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat digunakan untuk pengembangan Ilmu Politik khususnya kajian mengenai partisipasi politik masyarakat.

1.4.2 Manfaat Praktis.

1. Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber informasi tingkat partisipasi politik masyarakat Kota Kupang dan dapat digunakan untuk memberi masukan kepada masyarakat tentang pentingnya partisipasi politik, karena suara mereka sangat penting untuk memajukan daerah bahkan negara.

2. Dapat dijadikan sebagai informasi dan bahan pertimbangan bagi para pengambilan kebijakan dalam hal ini Kota Kupang terkait upaya meningkatkan partisipasi politik masyarakat.
3. Hasil penelitian ini juga dapat dijadikan referensi bagi pembaca dan peneliti yang akan melakukan penelitian dengan tema yang sama.

